KEBIJAKAN PENERAPAN REHABILITASI BAGI ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) PENGGUNA NARKOTIKA SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TINDAKAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER
(Studi Putusan No. 83-K/PM II-08/AU/V-2018)

YUDI HISTAKA

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tindakan pemecatan sebagai bentuk pidana tambahan dalam KUHPM, dapat dilakukan oleh pimpinan walaupun putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mewajikan terdakwa oknum prajurit militer yang menggunakan narkotika untuk direhabilitasi. Di samping itu, untuk mengetahui kedudukan Surat Perintah atau Telegram Pimpinan TNI dihadapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan untuk mengetahui kendala-kendala penerapan rehabilitas medis dan sosial bagi penyalahguna narkotika yang berasal dari oknum prajurit militer dan bentuk-bentuk rehabilitasi khususnya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum dan keadilan. Immanuel Kant menjelaskan bahwa adanya hubungan antara hukum positif dan kepastian hukum, dimana hukum positif berasal dari persyaratan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus atau studi kasus dan diserati dengan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Tindakan pemecatan bagi oknum prajurit TNI yang melakukan penyalahgunaan narkotika sesuai perintah atau telegram Pimpinan TNI dapat dibenarkan karena setiap perbuatan atau tindakan TNI yang melanggar hukum, disiplin, tata tertib yang dapat menurunkan martabat dan kewibawaan serta dapat pula menimbulkan karesahan dalam masyarakat perlu dengan cepat diambil tindakan hukum. Bagi anggota TNI yang melakukan tindak pidana diproses di peradilan tersendiri di luar peradilan umum, yaitu diproses di Peradilan Militer yang tercantum dalam Pasal 5 ayat 1 pda Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Apabila dilihat dari Putusan Nomor: 83-K/PM II-08/AU/V-2018 dapat dikatakan bahwa kedudukan Terdakwa yang merupakan anggota TNI AU adalah pengguna narkotika dikatakan sebagai pelaku dan sebagai korban sangat sulit dibedakan. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat disamakan dan upaya penanggulangannya juga harus dibedakan. Pada praktiknya di lingkungan Pengadilan Militer baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI untuk perkara narkotika belum pernah diterapkan baik pada saat pemeriksaan persidangan maupun dalam putusan. Hal ini terkendala karena belum ada regulasi internal di institusi TNI yang mengatur tata cara rehabilitasi medis dan sosial bagi prajurit TNI selaku korban penyalahgunaan. Beberapa putusan perkara penyalahgunaan narkotika yang dianalisis, bila terbukti maka hakim tingkat pertama umumnya menjatuhkan hukuman pidana pokok penjara, pidana denda dan/atau pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer. Lebih lanjut, pada saat perkara diajukan upaya hukum banding acap kali dikuatkan oleh pengadilan militer tingkat banding.

POLICY FOR APPLICATION OF REHABILITATION FOR MEMBERS OF INDONESIAN NATIONAL ARMY (TNI) USERS OF NARCOTICS AS FORM OF LEGAL PROTECTION ON ACTION SPLITING OF THE MILITARY SERVICE
(Study of Decision No. 83-K / PM II-08 / AU / V-2018)

YUDI HISTAKA

ABSTRACT

This research was conducted to find out the act of dismissal as an additional form of criminality in the KUHPM, can be carried out by the leadership even though the court ruling that has legal powers still presents the defendants of military personnel using narcotics to be rehabilitated. In addition, to find out the position of the Military Leadership Order or Telegram faced with Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and to find out the obstacles to the implementation of medical and social rehabilitation for narcotics abusers from military personnel and particular forms of rehabilitation.

The theory used in this study is the theory of legal certainty and justice. Immanuel Kant explained that there is a relationship between positive law and legal certainty, where positive law comes from legal certainty requirements.

The research method used in this thesis is normative juridical research using a case approach or case study and harmonized with legislation.

The results of this study conclude that the act of dismissal for individual TNI soldiers who commit narcotics abuse according to the instructions or telegram of the TNI leadership can be justified because of any actions or actions of the TNI that violate the law, discipline, discipline, which can reduce dignity and authority and can cause harm in the community legal action needs to be quickly taken. For TNI members who commit criminal acts, they are processed in a separate court outside the public court, which is processed in the Military Courts listed in Article 5 paragraph 1 in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts. When viewed from Decision Number: 83-K / PM II-08 / AU / V-2018 it can be said that the position of the Defendant who is a member of the Indonesian Air Force is that narcotics users are said to be perpetrators and as victims it is very difficult to distinguish. However, this cannot be equated and the mitigation efforts must also be distinguished. In practice, in the Military Courts, both at the first level and at the appeal level, medical and social rehabilitation for TNI soldiers for narcotics cases has never been applied both during the hearing and in the verdict. This is constrained because there is no internal regulation in the TNI institution that regulates medical and social rehabilitation procedures for TNI soldiers as victims of abuse. Several decisions on narcotics abuse cases were analyzed, if proven, the first level judge generally sentenced him to imprisonment, fine and / or additional criminal penalties in the form of dismissal from military service. Furthermore, at the time the case was filed an appeal was often strengthened by an appeal court.